



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak memasuki awal abad ke-20, film mendapat tempat sebagai sebuah kemajuan teknologi yang menawarkan kebaruan dalam hal konten dan fungsi dibanding media komunikasi lainnya. Film menawarkan kebaruan berupa presentasi dan distribusi dalam dunia hiburan seperti cerita, musik, drama, humor, dan teknik-teknik terkait pola konsumsi populer. Oleh karena itu, film sebagai salah satu bentuk media komunikasi massa mendapat sambutan hangat di masyarakat dan dengan cepat mampu menjangkau jumlah populasi yang luas, bahkan hingga ke pedesaan (Mcquail, 2010, p. 32).

Film sebagai bentuk komunikasi massa bukanlah medium netral dan ada dengan sendirinya. Hal ini dapat dilihat dari tiga karakteristik film jika dirunut melalui aspek historisnya. Pertama, film sebagai alat propaganda dan politik. Kedua, film sebagai bentuk seni dan hiburan. Ketiga, sebagai bentuk kebangkitan gerakan sosial. Tiga karakteristik ini ada karena memanfaatkan jangkauan film yang luas, pendekatan realisme, dampak emosional yang ditimbulkan, serta popularitas (Mcquail, 2010, p. 32). Ini juga bermakna bahwa film sebagai media komunikasi massa yang membawa pesan dan gambar berisi gagasan vital kepada publik dengan daya pengaruh yang besar (Handayani, 2015, p.1).

Sebagai media komunikasi massa yang membawa pesan, film memiliki cerita. Oleh karena itu di dalam film, cerita hadir dengan menampilkan babak-babak adegan yang saling berkaitan. Struktur penceritaan adegan dalam film banyak dipengaruhi oleh penulisan literatur, oleh sebab itu dari segi naratif, film dibagi menjadi dua, fiksi dan nonfiksi (Nelmes, 2012, p. 80).

Dari pembagian jenis film di atas, film dokumenter termasuk ke dalam bagian nonfiksi. Film dokumenter sendiri adalah potret dari kehidupan, yang menggunakan peristiwa sehari-hari sebagai objek pembuatan film dan dikonstruksi oleh pembuat film yang membuat banyak keputusan mengenai cerita apa, untuk disampaikan kepada siapa, serta untuk tujuan apa (Aufderheide, 2007, p. 2). Keputusan-keputusan itu pula yang akhirnya menunjukkan jika film dokumenter memiliki peran sebagai penyampai pesan sosial. Sehingga nantinya terbentuk representasi yang wajar dan jujur tentang pengalaman sehari-hari karakternya. Poin ini yang akhirnya membedakan film dokumenter dengan film fiksi.

Menurut Chris Atton, film dokumenter bisa juga termasuk ke dalam bentuk jurnalisme alternatif. Ini karena jurnalisme alternatif memberi perhatian pada bagaimana cara media dikelola dan tumbuh dalam konteks sosiokultural. Selain itu, menjadikan masalah sosial sebagai subjek pembahasan. Jurnalisme alternatif juga menawarkan kisah yang berbeda dibandingkan dengan media massa arus utama. Perbedaan ini terjadi karena jurnalisme alternatif merespon dengan tidak hanya mengkritik media massa tersebut tetapi, mengonstruksinya sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sosial. Biasanya jurnalisme alternatif

mencakup nilai-nilai yang luput dibahas atau interpretasi yang berbeda dari media arus utama (Atton, 2001, p. 10).

Salah satu film dokumenter yang sedang banyak dibicarakan adalah *Jakarta Unfair*. Film dokumenter ini mengambil cerita yang berbeda dari media massa arus utama tentang penggusuran warga miskin yang sempit ramai di Jakarta. Penggusuran itu menjadi bahan pembicaraan karena media pada umumnya menyoroti perlawanan warga dan bukan membahas dampak bagi mereka yang tergusur. Sebanyak 113 kasus penggusuran di Jakarta pada tahun 2015 berdampak bagi 8.145 kepala keluarga. Bila satu keluarga berjumlah empat orang maka penggusuran berdampak bagi 32.580 jiwa (Kompas Interaktif, 2016).

Film *Jakarta Unfair* yang disutradai oleh Dhuha Ramadhani dan Sindy Febriyani ini mengangkat isu tentang penggusuran yang terjadi di Jakarta dari perspektif warga terdampak. Penggusuran ini dilakukan terhadap warga miskin dengan alasan untuk menormalisasi sungai dan mengembalikan ruang terbuka hijau. Seperti telah diketahui, mereka yang tergusur adalah warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di pinggir sungai di Jakarta.

Film ini sempat dilarang ditayangkan di Taman Ismail Marzuki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) TIM. Mereka beralasan area Taman Ismail Marzuki merupakan pusat kesenian dan kebudayaan di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta, sehingga mereka merasa berisiko jika menayangkan film tersebut (Juniman, 2016, para 5). Dhuha Ramadhani bahkan sudah menduga hal ini akan terjadi terhadap filmnya. Sebab, film *Jakarta Unfair* ini secara jelas mengkritik Pemprov DKI Jakarta (Dewi, 2016, para 11).

Film ini pula sempat disinggung oleh calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti dalam debat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia saat itu bertanya kepada lawannya yang juga petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang penggusuran yang sampai membuat warga menangis seperti pada dalam film tersebut. Saat itu Ahok menjawab penggusuran adalah upayanya untuk memperbaiki sistem pengairan sehingga tidak terjadi lagi banjir di Jakarta dan hanya menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai. Ahok juga menyebutkan warga tetap salah meski sudah puluhan tahun tinggal di bantaran sungai dan mereka ini dijanjikan akan dipindah ke tempat yang layak.

Film dokumenter ini berkisah tentang sejumlah tokoh yang menjadi korban penggusuran. Ada nelayan yang tinggal di kampung akuarium Jakarta yang tergusur karena proyek revitalisasi kota tua dan penanggulangan banjir rob. Mereka tinggal di bedeng-bedeng kayu di pinggir sungai yang bermuara ke laut. Nelayan korban gusuran ini meski tempat tinggal mereka telah dirubuhkan, tetap bertahan dan tinggal di perahu, sehingga mereka terkenal dengan sebutan manusia perahu. Kemudian pedagang ayam potong dan nasi goreng yang ikut tergusur padahal sudah tinggal bertahun-tahun di daerah Bukit Duri dan Kampung Pulo Jakarta. Mereka bahkan bercerita sudah membayar pajak bumi dan bangunan, listrik, serta air tetapi tetap dianggap ilegal karena tinggal di tanah milik negara dan daerah aliran sungai.

Apa yang terjadi selanjutnya terhadap para tokoh ini adalah mereka diminta pindah dan tinggal di rumah susun (rusun) yang disediakan Pemprov DKI. Nyatanya, mereka kehilangan mata pencaharian karena pindah ke rusun. Mereka pun harus mengeluarkan ongkos lebih besar karena letak rusun yang tidak strategis

padahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit. Maka, ini menyebabkan mereka harus menanggung biaya sewa rusun dan mendapat ancaman akan disegel jika lebih dari tiga bulan. Meski sudah melakukan gugatan secara hukum, bahkan warga Bukit Duri memenangi gugatan tersebut, mereka tetap tergusur dari tempat tinggalnya. Mereka merasa ditipu dengan janji-janji saat kampanye dan hanya dilibatkan saat pemilihan umum saja. Mereka tidak dilibatkan dalam upaya pembangunan dan pencarian solusi masalah yang dilakukan pemerintah. Akhirnya warga yang tergusur hanya menjadi korban politik dan kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.

Mereka yang tinggal di daerah kumuh seperti di bedeng-bedeng pinggir sungai, kolong tol, serta kampung-kampung yang sempit dan sesak harus rela tergusur menunjukkan kebijakan pembangunan yang belum adil dan merata. Kebijakan pembangunan ini pula yang menunjukkan jika di Ibukota masih ada ketimpangan kesejahteraan. Ini karena mereka yang tergusur umumnya adalah warga miskin.

Warga miskin menurut Undang-Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 2011 didefinisikan sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya. Kebutuhan dasar itu antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang di atas, ada dua aspek dalam melihat kemiskinan, yakni aspek ekonomi dan sosial.

Sedangkan menurut laporan dari lembaga Program Pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nation Development Program (UNDP) pada 1997 mengenalkan dan menjelaskan tentang konsep kemiskinan sebagai ketiadaan pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan sebagai manusia seperti hidup layak, akses ke fasilitas kesehatan, kebebasan, harga diri, serta rasa dihormati seperti orang lain. Dalam konsep itu pula, kemiskinan terbagi menjadi tiga perspektif yaitu perspektif pendapatan, perspektif pemenuhan kebutuhan dasar, dan perspektif kemampuan. Konsep kemiskinan itu sendiri bergantung pada konteks kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat sehingga, ada tiga indikator dasar yang digunakan untuk menunjukkan kemiskinan yaitu usia harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak.

Kemiskinan yang menimpa masyarakat terutama yang tinggal di perkotaan terjadi karena kurangnya pendidikan dan tidak memiliki kemampuan yang memadai. Mereka ini adalah masyarakat urban yang datang berbondong-bondong dari kampung halaman karena tergiur untuk mengadu nasib di kota demi hidup yang baik. Hasilnya, masyarakat urban ini serta penduduk asli kota tersebut harus keluar dari jerat kemiskinan yang menimpa mereka.

Sebagai sebuah fenomena ketimpangan sosial, kemiskinan di perkotaan sering kemudian dijadikan isu dalam dunia sinema. Sara Dickey (1993, p. 7). mengungkapkan sinema dan kaum miskin kota sangat lekat. Hal ini karena kaum miskin perkotaan, baik secara sosial, kultural, dan ekonomi dapat mengungkapkan beragam hal seperti identitas dan relasi kelas yang menunjukkan keadaan posisi kaum miskin yang tidak berdaya. Kelas nantinya akan memunculkan identitas

bagi masyarakat tersebut. Selain itu, kelas pula yang nantinya akan menentukan sikap yang menjadi ciri masyarakat. Meski begitu, Sara Dickey (1993, p. 9) tidak menggunakan kata “proletariat” atau “kelas pekerja” untuk menyebut masyarakat miskin kota. Dia menggunakan frasa “kaum miskin urban”. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan mengaku-ngaku yang dilakukan masyarakat itu sendiri dan pelabelan yang menunjukkan kesan negatif. Selain itu, frasa “kaum miskin urban” lebih deskriptif dan definitif dibandingkan dengan kata “kelas bawah”.

Ketidakpastian sosial dan ekonomi merupakan hal yang dekat dengan kaum miskin urban. Pekerjaan yang tidak tentu datangnya atau mengandalkan cuaca, harga sewa rumah naik bahkan hingga tak terjangkau, harga komoditas pangan yang naik turun tanpa pemberitahuan adalah hal-hal yang dekat dengan kaum miskin urban (Dickey, 1993, p. 16).

Kemiskinan pula yang membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa ketika terjadi penggusuran. Hal ini dikarenakan kekuatan berasal dari kekayaan, prestise, dan koneksi politik. Ketika kaum miskin urban dihadapkan pada posisi yang sulit dan tidak adil, mereka tidak dapat berbuat banyak, dan justru mengalami kesulitan dalam birokrasi serta tindakan paksa dari aparat yang berwenang. Satu-satunya jalan adalah melalui protes yang terencana, meski belum tentu mereka mendapatkan haknya kembali (Dickey, 1993, p. 17).

Berdasarkan dari hal tersebut peneliti ingin melihat bagaimana representasi kemiskinan di Ibukota dalam film dokumenter *Jakarta Unfair*. Representasi sendiri merupakan penggunaan bahasa untuk mengatakan sesuatu yang memiliki arti lain

atau mewakili sesuatu yang penuh makna kepada orang lain. Selain itu, representasi adalah produksi serta pertukaran makna antar anggota dari suatu budaya yang menggunakan bahasa, tanda-tanda, dan gambar, baik yang berdiri sendiri atau untuk mewakili sesuatu (Hall, 2012, p. 15). Penelitian ini nantinya akan menunjukkan apa saja representasi kemiskinan di Ibukota yang ada pada film dokumenter *Jakarta Unfair*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: bagaimana representasi wajah kemiskinan di Ibukota dalam film dokumenter *Jakarta Unfair*?

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana film dokumenter *Jakarta Unfair* merepresentasikan kemiskinan, baik itu kemiskinan kultural, natural, dan struktural di Ibukota?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana film dokumenter *Jakarta Unfair* merepresentasikan kemiskinan kultural, natural, dan struktural di Ibukota?

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1.5.1 Manfaat Penelitian Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membahas peran dan posisi film dokumenter untuk menyampaikan pesan sosial dalam konteks sebagai karya jurnalistik.

1.5.2 Manfaat Penelitian Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pembuat film dokumenter tentang bagaimana film dokumenter berupaya mengangkat dan merepresentasi isu sosial. Terutama dalam mengangkat isu kemiskinan perkotaan.

1.5.3 Manfaat Penelitian Sosial

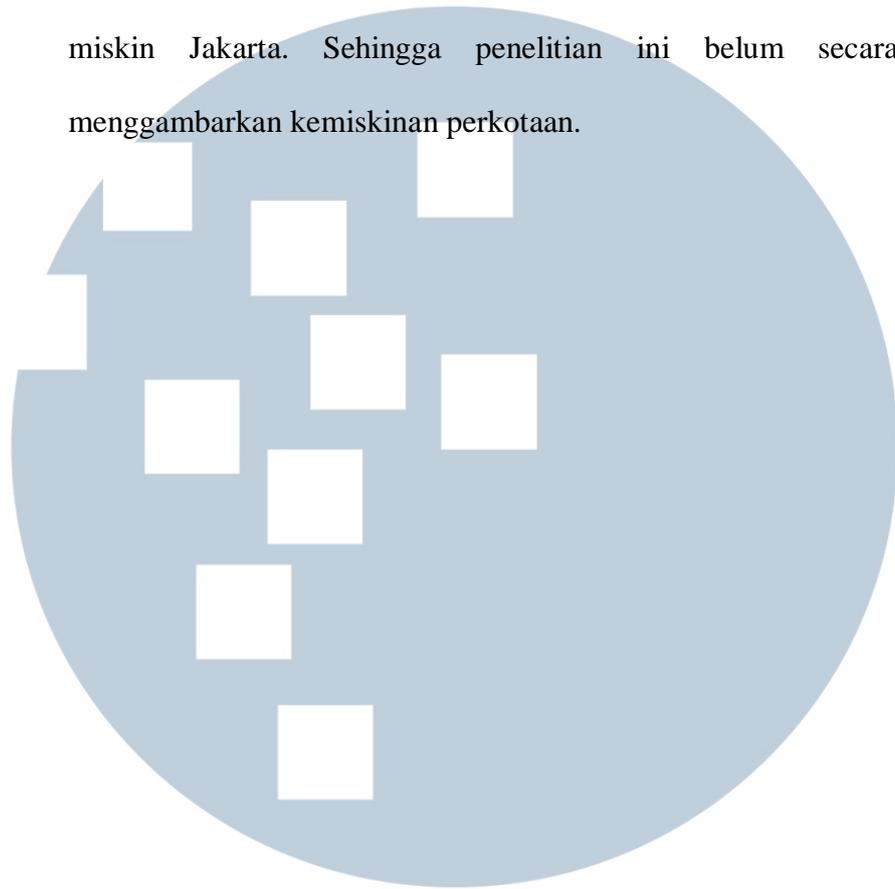
Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan referensi tentang film dokumenter serta upaya menyampaikan isu sosial, terutama isu kemiskinan perkotaan kepada masyarakat dengan perspektif yang berbeda dengan media arus utama.

1.6 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam referensi karena masih belum banyak kajian tentang kemiskinan perkotaan dalam film dokumenter.

Selain itu, penelitian ini berangkat dari sisi pandang peneliti terhadap pembuat film dokumenter dalam merepresentasikan kemiskinan. Penelitian ini belum membahas kemiskinan dari sudut pandang pemerintah dan warga

miskin Jakarta. Sehingga penelitian ini belum secara lengkap menggambarkan kemiskinan perkotaan.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA